

## ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN TARIF PPN DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM (CGE)

IMAN AKHADI  
UMAR ISSA ZUBAIDI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia  
[iman.akh@gmail.com](mailto:iman.akh@gmail.com), [umarissazubaidi@yahoo.com](mailto:umarissazubaidi@yahoo.com)

Received: September 12, 2025; Revised: September 22, 2025; Accepted: September 23, 2025

**Abstract:** *This study aims to analyze the impact of the Value Added Tax (VAT) rate increase policy from 11% to 12% on the Indonesian economy, particularly on economic growth, household consumption, and private consumption. The study was conducted using a static Computable General Equilibrium (CGE) Model based on the 2022 Social Accounting Matrix (SAM), adopting the RIAPA model framework developed by IFPRI to simulate fiscal policy. The simulation was conducted through two scenarios: scenario I, which applies a full VAT rate increase to all taxable goods and services, and scenario II, which applies a VAT rate increase with a differentiation scheme according to PMK No. 131/2024, which is only imposed on luxury goods that are subject to PPnBM. The results of the study indicate that the first scenario has a contractionary impact on the economy, with a decrease in GDP of -0.154%, a decrease in household consumption of -0.550%, and a decrease in private consumption of -0.431% as a result of the increase in prices of goods and services, which ultimately suppresses consumer purchasing power. In contrast, the second scenario produces a more neutral impact on economic growth, household and private consumption, while still increasing state revenue, with an insignificant effect on economic growth of  $-1.05e^{-5}$ , on household consumption of  $5.03e^{-5}$ , and on private consumption of  $2.01e^{-6}$ . This finding confirms that the tariff differentiation policy is more effective in maintaining a balance between optimizing state revenue and protecting public purchasing power.*

**Keywords:** CGE, fiscal policy, GDP, household consumption, VAT

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi swasta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Model *Computable General Equilibrium* (CGE) statis berbasis Social Accounting Matrix (SAM) 2022, dengan mengadopsi kerangka model RIAPA yang dikembangkan oleh IFPRI untuk melakukan simulasi kebijakan fiskal. Simulasi dilakukan melalui dua skenario yaitu skenario I dengan menerapkan kenaikan tarif PPN secara penuh pada semua barang dan jasa kena pajak dan skenario II dengan menerapkan kenaikan tarif PPN dengan skema diferensiasi sesuai PMK No. 131/2024 yang hanya dikenakan pada barang mewah yang menjadi objek PPnBM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skenario pertama berdampak kontraktif terhadap perekonomian, dengan penurunan PDB sebesar -0,154%, penurunan konsumsi rumah tangga sebesar -0,55% serta penurunan konsumsi swasta sebesar -0,431% sebagai dampak dari kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya menekan daya beli konsumen. Sebaliknya, skenario kedua menghasilkan dampak yang lebih netral terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga dan swasta, sekaligus tetap meningkatkan penerimaan negara, dengan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar  $-1,05e^{-5}$ , terhadap konsumsi rumah tangga sebesar  $5,03e^{-5}$  serta konsumsi swasta

sebesar 2,01e<sup>-6</sup>. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan diferensiasi tarif lebih efektif menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan daya beli masyarakat.

**Kata kunci:** CGE, kebijakan fiskal, konsumsi rumah tangga, PDB, PPN

## PENDAHULUAN

*Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sampai dengan tahun 2022, besarnya *tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 10,4%, sedangkan pada tahun 2023 data *tax ratio* turun menjadi 10,31%. Angka *tax ratio* ini turun lagi menjadi 10,08% pada akhir tahun 2024, dan pada semester pertama 2025 *tax ratio* mengalami penurunan menjadi 8,42% ([MUC Consulting, 2025](#)). Penurunan angka *tax ratio* pada semester I 2025 ini akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah yang telah menetapkan target *tax ratio* sebesar 12,36% pada tahun 2025 ([Bappenas, 2025](#)). Dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara-negara Asia Pasifik yang mencapai 19,5% pada tahun 2023, maka besarnya *tax ratio* Indonesia masih tertinggal jauh ([OECD, 2025](#)). Penelitian oleh [Akhadi \(2021\)](#) menunjukkan bahwa selama periode 2012-2021, Direktorat Jenderal Pajak hanya berhasil merealisasikan penerimaan pajak melebihi target RAPBN pada tahun 2021. Sebelum tahun 2021, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam RAPBN.

Untuk meningkatkan *tax ratio*, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perpajakan melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% diberlakukan sejak 1 April 2022, dan selanjutnya menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Menanggapi reaksi penolakan dari masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131

Tahun 2024, yang mengatur bahwa tarif PPN 12% hanya dikenakan penuh pada Barang Kena Pajak (BKP) mewah, seperti kendaraan bermotor dan barang lain yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Untuk BKP non-mewah, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung dengan mengalikan 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau nilai penggantian, sehingga tarif efektif tetap 11% untuk sebagian besar barang dan jasa kena pajak. Kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan peningkatan pendapatan negara dengan mitigasi dampak inflasi dan beban masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan perubahan tarif PPN terhadap pertumbuhan ekonomi, perubahan konsumsi rumah tangga dan swasta dengan mempertimbangkan implementasi PMK No. 131/2024 yang membedakan antara BKP mewah dan non-mewah. Berdasarkan data laporan APBN sampai dengan November 2024, kontribusi PPN/PPnBM terhadap penerimaan pajak nasional berada di kisaran 41,91% ([Kementerian Keuangan RI, 2024](#)). Hal ini menunjukkan pentingnya PPN dan PPnBM sebagai instrumen fiskal utama yang mendukung APBN dan pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti adalah (1) Bagaimana dampak perubahan tarif PPN terhadap pertumbuhan ekonomi? (2) Bagaimana dampak perubahan tarif PPN tersebut terhadap konsumsi rumah tangga? (3) Bagaimana dampak perubahan tarif PPN terhadap konsumsi swasta?

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan evaluasi dampak kebijakan fiskal perubahan tarif PPN terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga dan swasta. Hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan ini,

sejalan dengan *Asta Cita* kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru ([Bappenas 2025](#)). Kemandirian ekonomi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak akan mendukung pembangunan nasional yang mandiri tanpa bergantung pada bantuan luar negeri.

Untuk menganalisis dampak tersebut, peneliti akan menggunakan *Model Computable General Equilibrium* (CGE) sebagai alat utama. Model CGE adalah kerangka analisis yang mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan interaksi antar-sektor. Data utama yang digunakan adalah data *Social Accounting Matrix* (SAM), yang menyajikan variabel sosial-ekonomi dalam bentuk matriks terintegrasi, termasuk distribusi pendapatan rumah tangga, pola konsumsi, tabungan, ketenagakerjaan dan informasi terkait lainnya.

Penelitian serupa tentang dampak kebijakan fiskal menggunakan CGE telah dilakukan oleh [Agustina and Hartono \(2022\)](#), yang menemukan bahwa kenaikan PPN berdampak pada redistribusi pendapatan dan pertumbuhan sektor tertentu. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian dari [Agustina and Hartono \(2022\)](#) adalah penggunaan data SAM, dimana [Agustina and Hartono \(2022\)](#) menggunakan SAM 2008 yang dimodifikasi ke tahun 2019, sementara penelitian ini menggunakan SAM 2022 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, sehingga data yang digunakan oleh peneliti lebih *up-to-date* dan relevan dengan kondisi pasca-pandemi serta implementasi UU HPP. Studi terkini lainnya, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% berpotensi menurunkan PDB nominal secara agregat dan meningkatkan kemiskinan jika tidak dimitigasi ([DDTCNews, 2024](#)). Penelitian ini akan memperluas analisis dengan

skenario diferensiasi tarif berdasarkan PMK 131/2024, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur CGE terkini.

### Tinjauan Literatur

Penelitian tentang dampak kenaikan tarif PPN menggunakan model CGE telah berkembang di Indonesia. [Amir et al. \(2013\)](#) melakukan penelitian dampak kebijakan fiskal dengan menggunakan Model CGE INDOFISCAL untuk mengevaluasi dampak reformasi kebijakan perpajakan tahun 2008 terhadap indikator makro ekonomi dan indikator sosial rumah tangga. Hasil penelitian oleh [Amir et al. \(2013\)](#) menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh OP dan PPh Badan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak sebagai bentuk stimulus terhadap perekonomian sehingga kebijakan tersebut memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

[Hasudungan et al. \(2016\)](#) melakukan penelitian tentang dampak kebijakan fiskal di Indonesia dengan menggunakan model CGE melalui peningkatan belanja pemerintah sebesar 10% dengan menggunakan 3 skenario yaitu melalui dana pinjaman, pemotongan subsidi serta menaikkan tarif pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pembiayaan belanja pemerintah melalui pinjaman (Skenario 1) menghasilkan peningkatan PDB tertinggi. Sebaliknya, pembiayaan melalui kenaikan pajak ad valorem (Skenario 3) menyebabkan kontraksi paling parah pada pendapatan nasional, sedangkan pembiayaan melalui pemotongan subsidi (Skenario 2) menghasilkan peningkatan PDB yang lebih kecil.

[Hermawan \(2016\)](#) melakukan analisis kebijakan fiskal di Indonesia menggunakan model CGE AGEFIS dari Kementerian Keuangan, dengan fokus pada penurunan subsidi bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi CO<sub>2</sub>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan subsidi tersebut dapat mengurangi emisi CO<sub>2</sub>, tetapi dengan konsekuensi penurunan pertumbuhan ekonomi,

kesejahteraan rumah tangga, dan konsumsi riil. Studi ini menekankan peran CGE dalam menilai dampak kebijakan fiskal terhadap lingkungan dan ekonomi, yang relevan dengan penelitian ini karena menyoroti trade-off antara peningkatan pendapatan pajak (PPN) dan dampak negatif pada konsumsi rumah tangga.

Penelitian oleh [Agustina and Hartono \(2022\)](#) menganalisis dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menggunakan model CGE dengan data SAM 2019. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% dikombinasikan dengan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% meningkatkan konsumsi pemerintah dan investasi, tetapi menurunkan konsumsi swasta, PDB, dan pendapatan rumah tangga, dengan penurunan terbesar pada rumah tangga pedesaan. Kebijakan kenaikan PPN memberikan dampak lebih kuat, sementara sektor seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, dan pertambangan mengalami peningkatan output terbesar. Temuan ini mendukung penggunaan CGE untuk evaluasi kebijakan fiskal, sejalan dengan fokus penelitian ini pada diferensiasi tarif PPN berdasarkan PMK 131/2024.

[Firdiansyah et al. \(2023\)](#) menganalisis dampak insentif fiskal perpajakan untuk mobil listrik berbasis baterai di Indonesia menggunakan model CGE-GTAP. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penghapusan bea masuk baterai dapat meningkatkan ekspor dan produksi di sebagian besar sektor, kecuali sektor baterai EV, tetapi menurunkan terms of trade dan komponen ekonomi lainnya. Kombinasi penghapusan bea masuk dengan PPN meningkatkan daya saing sektor baterai dan kendaraan, meskipun tidak meningkatkan PDB secara keseluruhan, dan mendorong kesejahteraan (*equivalent variation*). Temuan ini memperkuat pentingnya diferensiasi insentif fiskal dalam kebijakan PPN, mirip dengan pendekatan PMK 131/2024 untuk BKP mewah dan non-mewah.

Penelitian tentang penggunaan Model CGE untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dari luar negeri diantaranya yang dilakukan oleh [Erero \(2021\)](#) yang menganalisis kontribusi PPN terhadap pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan menggunakan model dynamic CGE. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 14% menjadi 15% menurunkan PDB sebesar 0,0002% pada tahun pertama tetapi meningkatkannya sebesar 0,0028% pada tahun berikutnya, dengan peningkatan pendapatan PPN rata-rata R3,2 miliar. Temuan ini mendukung penggunaan dynamic CGE untuk memprediksi dampak jangka panjang perubahan tarif PPN, relevan dengan simulasi kenaikan PPN 12% di Indonesia.

[Benjasak & Bhattarai \(2019\)](#) melakukan penelitian tentang dampak perubahan tarif PPN dan PPh Badan di Thailand menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 7% menjadi 10% dapat meningkatkan kesejahteraan bersih secara keseluruhan, karena keuntungan dari layanan publik yang didanai oleh pemerintah lebih besar daripada kerugian yang dialami rumah tangga akibat kenaikan pajak. Peningkatan PPN juga dapat meningkatkan harga dan menurunkan output di beberapa sektor, seperti pertanian dan manufaktur makanan, tetapi juga dapat meningkatkan output dan harga di sektor lain, seperti pertambangan dan jasa perdagangan.

[Takeda & Arimura \(2021\)](#) menganalisis reformasi pajak lingkungan di Jepang menggunakan dynamic CGE forward-looking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi pajak karbon dengan pengurangan pajak perusahaan menghasilkan dampak paling desirabel pada PDB dan pendapatan nasional, meskipun double dividend kuat hanya diperoleh dalam kasus tertentu. Studi ini menyoroti efek interaksi pajak dan manfaat reformasi, yang dapat diterapkan pada evaluasi kebijakan PPN di Indonesia.

[Sarwar \(2023\)](#) mengevaluasi reformasi pajak di Pakistan menggunakan model CGE dengan SAM 2017, menemukan bahwa

pengurangan tarif pajak penghasilan pribadi meningkatkan konsumsi dan pengeluaran pemerintah tetapi menurunkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor dalam jangka panjang. Pengenalan tarif pajak penghasilan datar rendah dikombinasikan dengan penurunan pajak perusahaan, pajak penjualan, dan bea cukai menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, ekspor, konsumsi, dan pendapatan rumah tangga. Studi ini menunjukkan manfaat reformasi pajak yang seimbang, yang dapat dibandingkan dengan kebijakan diferensiasi PPN di Indonesia untuk mengurangi dampak negatif pada konsumsi rumah tangga.

Sebagian besar studi sebelumnya tidak mempertimbangkan diferensiasi tarif seperti dalam PMK 131/2024, yang dapat memitigasi dampak negatif pada konsumsi rumah tangga non-mewah. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan data SAM terbaru dan analisis sensitivitas.

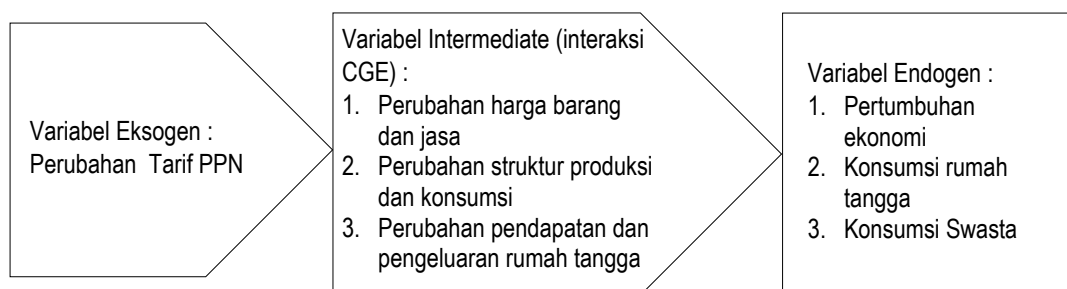
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal berupa kenaikan tarif PPN. Model CGE di Indonesia pertama kali digunakan pada tahun 1986 oleh BPS yang bekerjasama dengan ISS dan CWFS ([Resosudarmo et al., 2011](#)). Atas saran dan masukan dari Dr Djoni Hartono, salah seorang ahli pemodel CGE di Indonesia, penulis menggunakan model CGE yang dikembangkan oleh IFPRI (International Food Policy Research Institute) ([Lofgren et al., 2002](#)).

Keuntungan penggunaan model CGE meliputi pengukuran efisiensi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan optimal, dan daya saing internasional ([Lofgren et al., 2002](#)). Model ini bersifat statik komparatif, membandingkan baseline (tarif PPN 11%) dengan 2 skenario kebijakan yaitu (a) skenario I penggunaan tarif PPN 12% untuk seluruh BKP dan (b) skenario II penggunaan tarif PPN 12% untuk BKP mewah dan efektif 11% untuk non-mewah.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari (a) SAM Indonesia 2022 ([BPS, 2024](#)), (b) Data makroekonomi seperti PDB, konsumsi rumah tangga, dan pendapatan nasional dari BPS dan Kementerian Keuangan serta (c) Parameter elastisitas (substitusi produksi dan Armington).

Model CGE terdiri dari lima blok persamaan yaitu : (a) Blok Produksi yang menggambarkan struktur produksi, di mana perusahaan memaksimalkan profit dan meminimisasi biaya di pasar persaingan sempurna. (b) Blok Konsumsi yang menggambarkan perilaku rumah tangga dan institusi lain, termasuk fungsi utilitas Cobb-Douglas atau LES untuk konsumsi. (c) Blok Ekspor-Impor merupakan keputusan perdagangan menggunakan fungsi Armington untuk substitusi domestik-impor. (d) Blok Investasi menggambarkan simulasi permintaan modal baru. (e) Blok Keseimbangan Pasar yaitu kondisi ekuilibrium untuk tenaga kerja, barang, jasa, dan neraca pembayaran ([Resosudarmo et al., 2011](#)).



Gambar 1. Model Penelitian

Simulasi model CGE dilakukan dengan menggunakan aplikasi GAMS, dengan modifikasi struktur pajak untuk PPN. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (a) Variabel Eksogen yaitu berupa Tarif PPN (kenaikan dari 11% ke 12% untuk BKP mewah). (b) Variabel Endogen yaitu berupa Pertumbuhan ekonomi (perubahan PDB riil), konsumsi rumah tangga (total pengeluaran per komoditas) dan konsumsi swasta. (c) Variabel Intermediate yaitu harga relatif barang/jasa, distribusi pendapatan, pajak tidak langsung dan pendapatan pemerintah.

Analisis sensitivitas dilakukan terhadap parameter kunci yaitu elastisitas substitusi produksi, elastisitas Armington, dan proporsi konsumsi rumah tangga, untuk memvalidasi robustitas hasil. Elastisitas dalam model ditentukan berdasarkan praktik standar dalam literatur CGE. Elastisitas substitusi antara faktor produksi ( $\sigma_{VA}$ ) diasumsikan sebesar 0,5, mengikuti model multi-produk CGE yang digunakan dalam studi [Punt et al., \(2013\)](#). Sementara itu, elastisitas Armington ( $\sigma_{Arm}$ ) yang merepresentasikan substitusi antara barang domestik dan impor ditetapkan sebesar 2, sesuai dengan praktik umum dalam literatur CGE pertanian dan berada dalam kisaran estimasi empiris untuk Indonesia, yakni sekitar 2,4–4,1 untuk komoditas beras ([Warr, 2009](#)). Nilai-nilai parameter ini dipilih karena dianggap konservatif untuk analisis jangka pendek serta konsisten dengan penggunaan model CGE Indonesia dalam literatur sebelumnya. Gambar 1 adalah model penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian.

Pada gambar 1 menunjukkan alur model penelitian, dimana Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal berupa kenaikan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025 sesuai amanat UU No 7 tahun 2022. Dengan adanya kebijakan fiskal tersebut, maka secara langsung akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang menjadi objek PPN dan PPn BM. Dampak ini akan terlihat melalui

interaksi blok produksi dan konsumsi yang dianalisis melalui model CGE. Hasil output model CGE akan terlihat dari hasil simulasi melalui 2 skenario melalui perubahan tarif PPN terhadap PDB, konsumsi rumah tangga dan swasta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Penerimaan Pajak Indonesia

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam APBN. Proporsi penerimaan perpajakan terhadap Total Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 1980 sampai 2018 terus mengalami peningkatan dari 27,1% (1980) menjadi 78,9% (2018). Sebaliknya proporsi PNBP terhadap Total Penerimaan Perpajakan dan PNBP terus mengalami penurunan dari 72,9% pada tahun 1980 menjadi 21,9% pada tahun 2018 ([Amir & Nugroho, 2019](#)). Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 telah berhasil mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan tidak lagi mengandalkan sektor sumber pendapatan PNBP dari sumber daya alam yang bersifat terbatas dan *unsustainable*. Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir, realisasi penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,11% pertahun. Pertumbuhan tertinggi tercapai pada tahun 2022 yang mencapai kenaikan sebesar 31,85% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil keluar dari ancaman krisis ekonomi pasca pandemi *Covid-19*, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi sebesar -2,07%, serta pendapatan perpajakan turun sebesar 17,8% dibandingkan dengan tahun 2019 ([Kementerian Keuangan RI, 2020](#)).

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan (dalam Milyar Rupiah) Selama Tahun 2020-2024**

Jenis Pajak	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Penghasilan	588.311,96	686.752,48	991.488,69	1.056.264,88	1.038.768,06
PPN dan PPnBM	453.594,42	548.396,43	694.776,88	749.872,92	811.437,28
PBB Sektor P5L	21.873,48	17.935,85	23.761,24	35.111,97	33.329,64
Cukai	185.896,67	210.648,08	226.661,40	218.828,52	224.896,52
Pajak Lainnya	10.497,06	12.830,88	6.779,47	9.962,36	11.995,16
<b>JUMLAH</b>	<b>1.260.17,59</b>	<b>1.476.563,72</b>	<b>1.943.430,68</b>	<b>2.070.040,65</b>	<b>2.120.426,66</b>

Sumber : LKPP Audited (data diolah)

Besarnya proporsi penerimaan pajak untuk setiap jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 2. PPN dan PPnBM menyumbangkan penerimaan perpajakan terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan dalam APBN dengan kisaran 35% sampai 38%. Oleh karena itu, kebijakan fiskal berupa kenaikan tarif PPN sebesar 1% tentunya akan sangat berdampak terhadap penerimaan negara mengingat proporsi penerimaan PPN sangat besar terhadap total penerimaan perpajakan.

PPN dan PPnBM merupakan jenis pajak objektif yang dikenakan terhadap Barang atau Jasa Kena Pajak. Karakteristik PPN berbeda dengan PPnBM, meskipun pengenaan pajaknya dilakukan secara bersama-sama oleh Pengusaha Kena Pajak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPnBM. Selain pengenaan tarif pajak yang berbeda dengan PPnBM, PPN dikenakan pada rantai distribusi dan produksi, menganut sistem pengkredian pajak masukan terhadap pajak keluaran serta dikenakan pada konsumen akhir. Sedangkan PPnBM merupakan pengenaan pajak tambahan

terhadap objek Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, yang sebenarnya sudah dikenakan PPN pada barang tersebut. Dikarenakan pengenaan PPnBM hanya pada barang yang tergolong mewah, maka yang menjadi sasaran pengenaan pajak pada dasarnya adalah subjek pajak yang tergolong sangat mampu (kaya). Hal ini berbeda dengan PPN yang tidak membedakan antara orang yang mampu atau tidak, karena yang dikenakan adalah objek Barang atau Jasa Kena Pajak.

PKP yang melakukan pemungutan PPnBM sudah tentu memungut PPN, akan tetapi tidak semua pemungut PPN dapat memungut PPnBM. Pengusaha yang dapat memungut PPnBM hanyalah PKP yang melakukan kegiatan Impor BKP yang tergolong mewah dari luar negeri dan PKP yang memproduksi BKP yang tergolong mewah, misalnya produsen mobil atau pengembang apartemen atau rumah mewah. Sehingga PKP yang menjadi pemungut PPnBM dapat dikatakan tidak sebanyak pemungut PPN.

**Tabel 2. Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Perpajakan Selama Tahun 2020-2024**

Jenis Pajak	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Penghasilan	46.68%	46.51%	51.02%	51.03%	48.99%
PPN dan PPnBM	35.99%	37.14%	35.75%	36.23%	38.27%
PBB P5L	1.74%	1.21%	1.22%	1.70%	1.57%
Cukai	14.75%	14.27%	11.66%	10.57%	10.61%
Pajak Lainnya	0.83%	0.87%	0.35%	0.48%	0.57%

Sumber : LKPP Audited (data diolah)

Jumlah penerimaan PPN dan PPnBM selama tahun 2020-2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana terlihat pada tabel 3.

Berdasarkan data pada Tabel 3, terlihat bahwa jumlah penerimaan PPN dan PPnBM didominasi oleh penerimaan PPN yang terdiri PPN Dalam Negeri, PPN Impor dan PPN Lainnya memiliki jumlah proporsi rata-rata 97,6%, sedangkan penerimaan PPnBM hanya menyumbangkan rata-rata 2,4% dari total penerimaan PPN dan PPnBM selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PPnBM yang dikenakan pada barang-barang mewah hanya menyumbangkan 2,4% dari total penerimaan PPN dan PPnBM. Oleh karena itu, respon masyarakat berbeda (tidak ada pertentangan) saat kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya diberlakukan pada barang-barang yang tergolong mewah yang menjadi objek PPnBM sesuai PMK No 131 Tahun 2024.

#### Data Social Accounting Matriks (SAM)

Data SAM atau dikenal dengan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) adalah kerangka data yang menyajikan variabel sosial-ekonomi dalam bentuk matriks yang ringkas dan terpadu. Variabel-variabel ini lebih menitikberatkan pada kelompok rumah tangga, termasuk distribusi pendapatan, pola konsumsi, kemampuan menabung, kondisi

ketenagakerjaan dan informasi tambahan lainnya. Kerangka SNSE disusun dengan mendisagregasi pelaku dan aktivitas ekonomi serta faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam periode waktu tertentu (BPS, 2024).

Tabel 4 menunjukkan keseimbangan di setiap akun neraca dan kaitannya dengan akun neraca lainnya. Baris pertama dan kolom pertama pada matriks tersebut menjelaskan keseimbangan antara penggunaan dan penyediaan. Baris pertama menjelaskan besaran penggunaan, yang terdiri dari Konsumsi Antara (melalui aktifitas faktor produksi) sebesar 17.657,89 triliun, Konsumsi Akhir (melalui institusi rumah tangga, pemerintah dan swasta/korporasi) sebesar 11.895,74 triliun, Pembentukan Modal (PMTB, Perubahan Inventori) sebesar 6.998,62 triliun, dan Ekspor sebesar 4.799,82 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka diperlukan penyediaan yang berasal dari impor maupun dari output domestik. Kolom pertama pada SNSE menjelaskan dengan rincian penyediaan ini, yaitu terdiri dari penyediaan yang berasal dari output domestik sebesar 37.245,98 triliun dan penyediaan yang berasal dari impor sebesar 4.106 triliun. Sehingga total penyediaan sama dengan total penggunaan yaitu sebesar 41.352,06 triliun.

**Tabel 3. Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM selama tahun 2020-2024 (Dalam Milyar Rupiah)**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PPN Dalam Negeri	304.017,05	344.670,95	398.485,31	462.317,03	507.044,86
2	PPN Impor	140.348,42	191.606,03	270.821,00	255.641,18	274.368,57
3	PPN Lainnya	713,29	3.964,18	6.158,82	8.010,59	10.197,91
4	PPnBM Dalam Negeri	5.508,29	4.842,43	14.423,12	16.795,56	13.355,03
5	PPnBM Impor	3.006,55	3.311,21	4.888,18	7.107,55	6.470,43
6	PPnBM Lainnya	0,809	1,63	0,444	1.000,78	0,472
	Jumlah PPN dan PPnBM	453.594,42	548.396,43	694.776,88	749.872,92	811.437,28

Sumber : LKPP audited (data diolah)

**Tabel 4. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia (triliun rupiah) Tahun 2022**

Klasifikasi Neraca	Barang dan Jasa (produk)	Produksi (industri)	Penciptaan Pendapatan	Alokasi Pendapatan Primer	Distribusi Pendapatan Sekunder	Penggunaan Pendapatan	Kapital	Finansial	Luar Negeri
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Barang dan Jasa (produk)	1	17.657,89				11.895,74	6.998,62		4.799,82
Produksi (industri)	2	37.245,98							
Penciptaan Pendapatan	3	19.588,09							3,63
Alokasi Pendapatan Primer	4		19.566,80	2.235,39					105,17
Distribusi Pendapatan Sekunder	5			19.179,88	3.432,25				232,03
Penggunaan Pendapatan	6				19.337,14	24,69			-
Kapital	7					7.441,39	445,14	3.405,47	
Finansial	8						3.855,27		-449,80
Luar Negeri	9	4.106,09	24,92	492,08	74,78	-	-7,02		

Sumber : BPS RI

Pada baris kedua dan kolom kedua pada Tabel 4 dapat dijelaskan tentang keseimbangan antara output dan input. Baris kedua menggambarkan jumlah output domestik yang diproduksi (termasuk pajak dikurangi subsidi atas produk) yaitu sebesar 37.245,98 triliun. Kolom kedua menjelaskan komposisi input yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tersebut. Input yang dimaksud terdiri dari input antara sebesar 17.657,89 triliun dan input primer atau nilai tambah sebesar 19.588,09 triliun. Dengan demikian, nilai output sama dengan total nilai input.

Data SNSE selanjutnya didisagregasi pada level lapangan usaha atau aktifitas menjadi 17 lapangan usaha serta pada level barang dan jasa atau komoditas menjadi 17 komoditas. 17 jenis lapangan usaha dan komoditas tersebut

meliputi : (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (17) Jasa Lainnya. Selain itu, neraca penciptaan pendapatan didisagregasi menjadi 3 kategori menurut klasifikasi nilai tambah. Sementara itu, neraca alokasi pendapatan primer, neraca

distribusi pendapatan sekunder, dan neraca penggunaan pendapatan didisagregasi menjadi 9 klasifikasi yang terdiri dari 5 klasifikasi rumah tangga menurut tingkat pendapatan, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, pemerintah, korporasi nonfinansial, dan korporasi finansial. Neraca kapital, neraca finansial, dan neraca luar negeri tidak didisagregasi ke klasifikasi yang lebih [rinci \(BPS, 2024\)](#).

### Uji Validitas Data

Sebelum dilakukan pengujian simulasi model CGE, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas data SAM dengan memastikan bahwa jumlah baris dan kolom pada data SAM harus seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Proses pengujian keseimbangan data SAM dilakukan dengan menggunakan metode RAS. Hasil pengujian dengan menggunakan software GAMS menunjukkan hasil selisih jumlah baris dan kolom menunjukkan angka 0,00000 yang berarti bahwa data telah seimbang (*balance*).

### Uji Kalibrasi Keseimbangan Pasar

Menurut Burfisher (2011) dalam [\(Amir & Nugroho, 2019\)](#), model CGE merupakan model keseimbangan umum yang memodelkan para pelaku atau agen-agen yang terlibat dalam suatu perekonomian beserta dengan interaksi *behavior*-nya masing-masing. Berbagai agen dalam perekonomian tersebut akan saling berinteraksi sampai terbentuknya suatu kondisi keseimbangan umum (*general equilibrium*) di setiap pasar yang ada dalam perekonomian. *Behavior*/interaksi para pelaku ekonomi dituangkan dalam bentuk persamaan yang diturunkan dari berbagai pola hubungan menurut teori ekonomi yang ada.

Untuk melakukan pengujian kalibrasi keseimbangan pasar, dilakukan dengan menghitung *supply* dan *demand* komoditas serta menggunakan parameter elastisitas permintaan dan penawaran yang meliputi parameter elastisitas substitusi antar faktor produksi (CES), elastisitas substitusi Armington

dan elastisitas transformasi ekspor (CET) [\(Amir & Nugroho, 2019\)](#). Hasil pengujian kalibrasi keseimbangan pasar dengan menggunakan software GAMS menunjukkan hasil status SOLVE optimal dengan iterasi = 0, yang berarti bahwa data telah seimbang (*balance*). Hal ini untuk memastikan bahwa model CGE yang sudah dibangun sebagai baseline mengasumsikan ekonomi dalam keadaan *equilibrium*.

### Simulasi Model

Simulasi dampak kebijakan fiskal dilakukan dengan menggunakan 2 skenario, yaitu skenario pertama mengasumsikan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% diberlakukan terhadap seluruh Barang dan Jasa Kena Pajak, sedangkan skenario kedua mengasumsikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya diberlakukan terhadap BKP yang tergolong barang mewah sebagaimana ditetapkan dalam PMK No 131 Tahun 2024, sedangkan BKP non-mewah masih menggunakan tarif PPN 11%. Hasil simulasi model yang dihasilkan dari GAMS terlihat pada tabel 5.

#### *Dampak perubahan tarif PPN terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Berdasarkan dari hasil simulasi model CGE melalui GAMS sebagaimana terlihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berupa kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada skenario I memberikan dampak penurunan GDP sebesar -0,154%. Kenaikan tarif PPN pada dasarnya akan berdampak pada kenaikan pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan sehingga konsumsi pemerintah naik sebesar 1,75%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Agustina & Hartono \(2022\)](#) dan [Erero \(2021\)](#) yang menyatakan dalam jangka pendek, kebijakan kenaikan tarif PPN akan menurunkan pertumbuhan ekonomi negara. Dampak penurunan GDP tersebut terjadi karena akibat kenaikan tarif PPN menyebabkan harga barang dan jasa akan naik, sehingga

masyarakat akan mengurangi konsumsi barang dan jasa. Sektor swasta sebagai produsen juga terkena dampak karena harga bahan baku produksi akan mengalami kenaikan akibat kenaikan tarif PPN tersebut. Sehingga produsen akan mengurangi jumlah produksi karena permintaan konsumen berkurang.

Pada skenario II, dampak dari kenaikan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan karena penurunan pertumbuhan ekonomi hanya berdampak sebesar  $-1,05e^{-5}\%$ . Hal ini terjadi karena pada skenario II, kenaikan PPN hanya diberlakukan terhadap barang dan jasa yang dikategorikan sebagai barang mewah yang menjadi objek PPnBM. Sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 3, proporsi penerimaan PPnBM terhadap total penerimaan PPN dan PPnBM hanya sebesar 2,4%, sehingga dampak kenaikan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan barang dan jasa karena objek barang dan jasa yang mengalami kenaikan hanya barang mewah sebagaimana diatur dalam PMK 131 tahun 2024.

#### *Dampak perubahan tarif PPN terhadap Konsumsi Rumah Tangga*

Sektor institusi rumah tangga merupakan sektor yang paling terdampak akibat dari kebijakan kenaikan tarif PPN oleh Pemerintah. Berdasarkan data SAM BPS, pendapatan nasional yang merupakan akumulasi pendapatan dari kegiatan produksi dengan pendapatan kepemilikan netto, memperlihatkan bahwa sebagian besar

pendapatan nasional berasal dari institusi rumah tangga, yaitu sebesar 11.282,8 trilyun.

Jika didisagregasi menurut kelompok pendapatan sebagaimana terlihat pada tabel 6, institusi rumah tangga dibagi menjadi 5 kelompok pendapatan. Kelompok rumah tangga kelas pendapatan teratas memiliki pendapatan nasional 12,83 kali lipat dibandingkan dengan kelompok rumah tangga kelas pendapatan terbawah (BPS, 2024).

Berdasarkan hasil skenario I, akibat kenaikan tarif PPN menimbulkan dampak penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 0,550%. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya kenaikan tarif PPN, maka harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan, sehingga konsumen akan mengurangi konsumsi barang dan jasa. Penurunan konsumsi oleh rumah tangga akan berdampak terhadap penurunan pendapatan perusahaan.

Akibat dari penurunan pendapatan perusahaan, maka selanjutnya perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga akan berdampak pula pada pendapatan rumah tangga.

Pada hasil skenario II, terlihat dampak yang dialami oleh rumah tangga tidak signifikan karena hanya berdampak sebesar  $5,03e^{-5}\%$ . Hal ini dapat dipahami karena barang dan jasa yang mengalami kenaikan tarif pajak hanya barang mewah yang dikenakan PPnBM, sehingga kenaikan tarif PPN tidak terjadi pada barang dan jasa yang menjadi konsumsi sebagian besar masyarakat.

**Tabel 5. Hasil Simulasi kebijakan kenaikan Tarif PPN**

Variabel	Skenario Shock Tarif PPN (% perubahan)	
	Skenario I	Skenario II
Pertumbuhan Ekonomi	-0,154	$-1,05e^{-5}$
Konsumsi Pemerintah	1,75	$1,12e^{-4}$
Konsumsi Rumah Tangga	-0,550	$5,03e^{-5}$
Konsumsi Swasta	-0,431	$2,01e^{-6}$

*Sumber : hasil model CGE (diolah)*

**Tabel 6. Pendapatan Nasional Menurut Institusi (Trilyun Rupiah) Tahun 2022**

No	Institusi	Nilai Tambah
1	Rumah Tangga	11.282,8
	Rumah Tangga 20%-1	423,1
	Rumah Tangga 20%-2	948,7
	Rumah Tangga 20%-3	1.810,4
	Rumah Tangga 20%-4	2.670,5
	Rumah Tangga 20%-5	5.430,1
2	Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga	32,5
3	Pemerintah	1.036,8
4	Korporasi non finansial	6.080,9
5	Korporasi finansial	746,9
	Jumlah Total	19.179,9

Sumber : SAM BPS

#### *Dampak perubahan tarif PPN terhadap Konsumsi Swasta*

Pada institusi Swasta, dampak kenaikan tarif PPN pada skenario I mengakibatkan penurunan konsumsi sebesar -0,431%. Seperti halnya dampak terhadap institusi rumah tangga, kenaikan tarif PPN akan berdampak pada kenaikan bahan baku barang yang menjadi komoditas produksi barang. Akibat kenaikan bahan baku, maka perusahaan harus menaikkan harga jual barang dan jasanya. Kenaikan harga barang akan berdampak pada penurunan konsumsi, sehingga pendapatan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Hasil simulasi ini sejalan dengan hasil penelitian [Agustina & Hartono \(2022\)](#).

Pada hasil skenario II menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN hanya memberikan dampak sebesar  $2,01e^{-6}$  %, Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar perusahaan tidak terdampak terhadap kenaikan tarif PPN yang hanya dikenakan pada barang mewah. Konsumen barang mewah yang dikenakan PPnBM pada dasarnya adalah kelompok konsumen rumah tangga berpenghasilan tinggi, sehingga institusi swasta tidak terdampak langsung terhadap kenaikan tarif PPN tersebut.

#### **Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis di atas, terdapat beberapa implikasi kebijakan

penting yang dapat dipertimbangkan pemerintah sebagai pengambil keputusan kebijakan fiskal, yaitu :

1. Perlu kehati-hatian dalam penerapan tarif penuh terhadap barang dan jasa kena pajak. Kenaikan PPN menjadi 12% secara seragam (Skenario 1) terbukti dapat menekan daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Hal ini berisiko akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
2. Dukungan terhadap diferensiasi tarif. Skema diferensiasi tarif sebagaimana diatur dalam PMK 131/2024 terbukti lebih efektif menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan konsumsi rumah tangga. Kebijakan ini dapat menjadi contoh penerapan fiskal yang lebih adil karena hanya dikenakan terhadap barang mewah, sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil kelompok rumah tangga berpenghasilan tinggi.
3. Kompensasi jangka pendek. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi, seperti subsidi energi atau bantuan sosial yang terarah, untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan harga. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi kelompok rumah tangga dengan daya

dibawah 2.200 VA pada bulan Januari dan Pebruari 2025.

4. Diversifikasi basis pajak jangka panjang. Ketergantungan yang tinggi pada PPN membuat penerimaan negara rentan terhadap fluktuasi konsumsi. Diversifikasi basis pajak, misalnya melalui perluasan pajak properti atau pajak lingkungan, dapat meningkatkan ketahanan fiskal.
5. Optimalisasi penerimaan PPN diharapkan tidak hanya bergantung pada kebijakan tarif, tetapi juga bisa dilakukan pada perbaikan administrasi perpajakan. Digitalisasi pajak, seperti implementasi e-faktur dan integrasi data berbasis teknologi (Coretax), berpotensi dapat meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. Dengan demikian, diferensiasi tarif pajak dapat berjalan beriringan dengan reformasi administrasi perpajakan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) statis berbasis Social Accounting Matrix (SAM) 2022. Analisis dilakukan melalui dua skenario, yaitu skenario I dengan penerapan tarif penuh pada barang dan jasa kena pajak dan skenario II dengan penerapan tarif diferensiasi sesuai PMK No. 131/2024.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario I berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan penurunan PDB sebesar -0,154% dan kontraksi konsumsi rumah tangga sebesar -0,550%. Dampak ini terutama dirasakan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang lebih sensitif terhadap kenaikan harga. Demikian pula pada sektor swasta, hasil dari simulasi I menunjukkan dampak pada penurunan konsumsi sebesar -0,431%. Akibat kenaikan tarif PPN perusahaan terpaksa menaikkan harga jual karena adanya kenaikan harga bahan baku produksi. Kenaikan

harga jual akan berdampak pada penurunan pendapatan karena konsumen akan mengurangi konsumsi barang dan jasa. Sebaliknya pada skenario II memberikan hasil yang lebih netral, dengan penurunan yang relatif kecil baik pada PDB, konsumsi rumah tangga serta konsumsi swasta, sehingga lebih mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Kedua skenario tetap menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, namun trade-off antara penerimaan negara dan konsumsi masyarakat lebih baik dikelola melalui skema diferensiasi tarif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang fleksibel dan berkeadilan lebih efektif dalam mengurangi tekanan jangka pendek terhadap perekonomian.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya peran desain kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan, tetapi juga memperhatikan dampak distribusional dan kesejahteraan masyarakat. Diferensiasi tarif PPN sebagaimana diatur dalam PMK No. 131/2024 dapat dijadikan alternatif strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan perlindungan daya beli rumah tangga.

Hasil temuan pada penelitian ini menegaskan bahwa desain kebijakan PPN yang adaptif dan diferensiatif dapat mengurangi dampak kontraktif terhadap perekonomian, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Selain memperkaya kajian akademis, hasil penelitian ini juga memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi perpajakan yang lebih berkeadilan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan model CGE statis sehingga fokus hanya terlihat pada dampak jangka pendek. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model CGE dinamis untuk menangkap dampak jangka panjang, termasuk aspek investasi, distribusi pendapatan, dan perubahan struktur ekonomi. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai variasi tarif atau penerapan insentif fiskal lainnya

dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai *trade-off* antara

pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan penerimaan negara.

## REFERENCES

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. 2022. Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Akhadi, I. 2021. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3 (2). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. 2013. The impact of the Indonesian income tax reform: A CGE analysis. *Economic Modelling*, 31 (1), 492–501. <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2012.12.018>
- Amir, H., & Nugroho, A. 2019. *Analisis Dampak Kebijakan Menggunakan Model Computable General Equilibrium (CGE)*. Gramedia.
- Bappenas. 2025. *Ringkasan RPJMN 2025-2029*.
- Benjasak, C., & Bhattarai, K. 2019. General Equilibrium Impacts of VAT and Corporate Income Tax in Thailand. *International Advances in Economic Research*, 25 (3), 263–276. <https://doi.org/10.1007/s11294-019-09742-7>
- BPS. 2024. *SAM Indonesia 2022*. BPS Indonesia.
- DDTCNews. 2024, November 19. *Bi Ungkap Dampak Tarif PPN 12 persen Terhadap Inflasi “Tidak Besar.”* <https://News.Ddtc.Co.Id/Berita/Nasional/1807664/Bi-Ungkap-Dampak-Tarif-Ppn-12-Persen-Terhadap-Inflasi-Tidak-Besar>.
- Erero, J. L. 2021. *Contribution of VAT to economic growth: A dynamic CGE analysis*. <https://doi.org/10.22367/jem.2021.43.02>
- Firdiansyah, A., & Gultom, A. Y. 2023. *Analisis Dampak Insentif Fiskal Perpajakan Mobil Listrik Berbasis Baterai Di Indonesia*.
- Hasudungan, H. W. V., & Sabaruddin, S. S. 2016. The Impact of Fiscal Reform on Indonesian Macroeconomy: A CGE Framework. S. Sabaruddin *CEJEME* (Vol. 8), 181-202.
- Hermawan, W. 2016. Analisis Kebijakan Fiskal Dan Implikasinya Kepada Perekonomian Indonesia: Analisis Keseimbangan Umum. *QE Journal*, 5 (2), 75-88.
- Kementerian Keuangan RI. 2024. *APBN Kita, Edisi Desember 2024*.
- Kementerian Keuangan RI. 2020. *LKPP Republik Indonesia Tahun 2020*.
- Lofgren, Hans, Rebecca Lee Harris, Sherman Robinson, Hans Lofgren, Rebecca Lee Harris, and Sherman Robinson. 2002. “A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS.” Unknown, ahead of print. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.42483>.
- MUC Consulting. 2025. *Rasio Pajak Turun di Awal 2025, Target 11% Kian Berat*. <https://Muc.Co.Id/Id/Article/Rasio-Pajak-Turun-Di-Awal-2025-Target-11-Kian-Berat#:~:Text=Data%20Kementerian%20Keuangan%20menunjukkan%20penerimaan,44%2C51%25%20dari%20target>.
- OECD. 2025. *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6c04402f-en>
- Punt, C., Mcdonald, S., & Vink, N. 2013. *Modelling multi-product industries in computable general equilibrium (CGE) models*. <http://scholar.sun.ac.za>
- Resosudarmo, B. P., Yusuf, A. A., Hartono, D., & Nurdianto, D. A. 2011. Regional Economic Modelling For Indonesia: Implementation Of IRSA-INDONESIA. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26 (3), 287-309.
- Sarwar, M. N. 2023. An Evaluation of Different Tax Reform Proposals in Pakistan using CGE Model. *The Pakistan Development Review*, 309–330. <https://doi.org/10.30541/v62i3pp.309-330>
- Takeda, S., & Arimura, T. H. 2021. A Computable General Equilibrium Analysis Of Environmental Tax Reform In Japan With A Forward-Looking Dynamic Model. *Sustainability Science*, 16(2), 503–521. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00903-4>

Warr, P. 2009. *Agricultural Protection and Poverty in Indonesia: A General Equilibrium Analysis*.  
[www.worldbank.org/agdistortions](http://www.worldbank.org/agdistortions)

*halaman ini sengaja dikosongkan*